

INOVASI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEPULAUAN MARITIM DI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE-KOTA TIDORE KEPULAUAN)

Windya Dirgantari, Lita Sari Barus

¹*Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta*
Email: dirgantari.windya@gmail.com ; lita_barus@yahoo.com

ABSTRAK

Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Sofifi merupakan wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki luas wilayah daratan lebih kecil dari luas wilayah perairan. Kota Ternate diamanatkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Provinsi Maluku Utara juga dilewati oleh jalur ALKI III sehingga memiliki potensi yang strategis dalam bidang perekonomian, pariwisata, sosial, budaya dan politik. Terdapat 4 aspek fokus yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pembangunan wilayah yang berbasis kemaritiman, yaitu (1) Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya Maritim; (2) Kedaulatan maritim; (3) Sumber Daya Alam dan Jasa; dan (4) Infrastruktur. Saat ini perkembangan kota di provinsi ini hanya terjadi di Kota Ternate yang merupakan pintu gerbang masuknya Maluku Utara. Inovasi pengembangan infrastruktur di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan (Kota Sofifi dan Pulau Tidore) dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perkembangan wilayah yang tidak merata dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana melakukan pemerataan pengembangan infrastruktur wilayah Provinsi Maluku Utara. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil dari penulisan ini adalah pemerataan pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan meningkatkan potensi yang ada di setiap wilayah dengan merumuskan konsep kota masa depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan. Kota Ternate dikembangkan sebagai pusat perdagangan, Kota Sofifi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan serta Pulau Tidore sebagai pusat pariwisata. Integrasi antara pengembangan wilayah juga dilakukan dengan inovasi infrastruktur pendukung ke wilayah lain di sekitarnya yang sangat dibutuhkan sebagai *trigger* pengembangan aktivitas perekonomian.

Kata kunci: Maritim, Inovasi Infrastruktur, Ternate, Tidore.

PENDAHULUAN

Provinsi Maluku Utara dengan ibukota Sofifi merupakan wilayah kepulauan di Indonesia dengan luas wilayah daratan lebih kecil dari luas wilayah perairan. Secara geografis Provinsi Maluku Utara terletak diantara 3° Lintang utara - 3° Lintang selatan dan 124°-129° Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara memiliki wilayah seluas 145.801,1 km, terdiri dari 805 pulau dengan 8 kabupaten dan 2 kota yaitu Ternate, Tidore, Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Utara, , Halmahera Tengah dan Kepulauan Sula (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, 2020).

Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia internasional melalui *Convention on the Law of Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Provinsi Maluku Utara yang berada diantara Pusat Kegiatan Nasional dan dilewati jalur ALKI III ini memiliki potensi yang strategis dalam bidang perekonomian, pariwisata, sosial, budaya dan politik.

Kota Sofifi bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950 dan dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemekaran wilayah. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033, Kota Sofifi dan Kota Tidore secara bersama – sama berada dalam Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) masuk dalam gugus pulau / wilayah pengembangan I (WP I) yang memiliki fungsi pelayanan tingkat nasional dengan kewenangan provinsi.

Terdapat 2 paradigma pembangunan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan wilayah pesisir yaitu pertama, kegiatan pembangunan ditujukan dan dilakukan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian antara kapasitas dan keadaan lingkungan dan sumber daya alamnya. Pemerintah bertugas dalam penyediaan infrastruktur publik dan merancang kebijakan ke arah peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua, pembangunan yang berbasis sumberdaya domestik. Sumber daya domestik mencakup sumber daya fisik-alam, sumberdaya manusia, sumber daya sosial dan sumberdaya buatan (Rustiadi, 2001). Sehingga diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan potensi alam domestik, sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung.

Sebagai ibukota provinsi, Kota Sofifi memiliki potensi pengembangan pusat pertumbuhan sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan, pengembangan pelabuhan nasional yang representatif sebagai ibukota provinsi serta sebagai pintu keluar – masuk pulau Halmahera. Namun nyatanya fungsi Sofifi yang terletak di Kecamatan Oba Utara sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara belum optimal dikarenakan adanya perubahan jarak, terbatasnya sarana transportasi serta perubahan waktu tempuh (Muhammad dan Moniaga, 2020)

Pulau Tidore memiliki kawasan Pelabuhan Rum. Dermaga yang ada di Pelabuhan Rum melayani penyeberangan ke Ternate dengan intensitas yang cukup tinggi. Kawasan ini bertindak sebagai pintu masuk dan keluar bagi Kota Tidore Kepulauan, sehingga kawasan ini dapat menjadi kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain Kawasan Pelabuhan Rum, Pulau Tidore juga memiliki potensi sumber daya alam (pala dan cengkeh), sejarah, budaya dan pusaka peninggalan sejarah yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan pariwisata di Provinsi Maluku Utara. Kawasan ini selain sebagai identitas Tidore juga sebagai identitas bagi Kepulauan Maluku Utara.

Dilihat dari fisik pembangunannya, perkembangan kota Tidore mengikuti pola jaringan jalannya yaitu memanjang di kawasan pesisir. Perkembangan kota dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, yang mana perkembangannya hanya kepada kawasan permukiman dan kawasan perdagangan jasa (Febrianty, 2015).

Kota Ternate merupakan gerbang masuk Kepulauan Maluku Utara yang memiliki potensi untuk berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Maluku Utara. Salah satu perkembangannya adalah dalam sektor industri, perikanan, perdagangan dan jasa. Secara geografis kota ini memiliki potensi yang sangat menguntungkan sebagai pusat distribusi barang maupun jasa yang akan di salurkan baik dari dan menuju Kota Ternate.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa aktifitas ruang wilayah Maluku Utara lebih cenderung berpusat di Kota Ternate. Ketersediaan akan pelayanan publik baik secara ekonomi maupun sosial berada di kota ini. Sehingga apabila tidak dilakukan pemerataan pembangunan akan menyebabkan kota – kota lain khususnya di Kota Sofifi dan Pulau Tidore menjadi yang kota mati dan tidak berkembang.

Fokus dari pembahasan ini adalah bagaimana melakukan perencanaan pembangunan agar terjadi pemerataan pengembangan wilayah baik di darat maupun di perairan Provinsi Maluku Utara sebagai kepulauan maritim.

METODE

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Analisa mengacu pada data dan informasi berasal dari data sekunder berupa peraturan

pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah, jurnal, laporan dan informasi dari internet yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang terjadi di Provinsi Maluku Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keterpaduan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Ruang yang dimaksud adalah ruang darat, laut, udara dan ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.

Penataan ruang diklasifikasikan menurut sistem, fungsi, wilayah administratif, kegiatan dan nilai strategis kawasan dengan memperhatikan: (1) kondisi fisik kawasan rawan bencana; (2) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan (3) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Lebih lanjut, di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038, dijelaskan bahwa diperlukan strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang salah satunya adalah dengan (1) mengembangkan potensi daya tarik wisata pesisir yang memberikan nilai ekonomi kreatif, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan; (2) peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; (3) menyediakan akses jalan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (4) peningkatan kapasitas infrastruktur dasar dan sarana penunjang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa penataan ruang tidak hanya berfokus pada batasan lingkup fisik, tetapi juga mencangkup kondisi sosial dan sumber daya yang ada di dalamnya. Sebagai wilayah pesisir, Provinsi Maluku Utara perlu menerapkan penataan ruang yang berbasis kemaritiman. Ehler (2017) mendefinisikan penataan ruang laut sebagai distribusi kegiatan antropogenik di wilayah pesisir dan laut untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan layak secara ekologis, sosial dan ekonomi dari suatu negara.

Sejarah Kota

Sejarah Kota Sofifi tidak bisa terlepas dari adanya kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Ternate merupakan kota tua yang berdiri sejak tahun 1257. Nama Ternate sendiri berasal dari kata Tara No Ate yang berarti “turun ke bawah dan pikatlah dia”. Maksudnya adalah turun dari tempat yang tinggi (gunung yang penuh rempah-rempah) untuk memikat para pendatang supaya mau menetap di pantai negeri ini. Dari namanya tampak betapa penduduk Ternate bersifat sangat terbuka kepada kaum pendatang (Maryanto dan Sutrisno, 2011).

Kerajaan Ternate dan Tidore pertama kali dikunjungi oleh Bangsa Eropa sejak abad ke-16. Bangsa Eropa memburu rempah – rempah yang merupakan sesuatu yang berharga pada saat itu dan berupaya memonopoli. Kerajaan Ternate memiliki peran yang sangat penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke 13 sampai abad ke 18. Kesultanan Ternate sangat Berjaya di abad ke 16 berkat perdagangan rempah – rempah dan kekuatan militernya. Wilayah kekuasaan kerajaan ini mencangkup wilayah Maluku, Sulawesi bagian Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga kepulauan Mashall di Pasifik. Kedua kerajaan tersebut menjadikan sejarah bagi Kota Sofifi. Kota Sofifi adalah ibukota bagi Provinsi

Maluku Utara sejak 4 Agustus 2010. Kota yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan merupakan pusat pemerintahan bagi Provinsi Maluku Utara. Secara sosial dan ekonomi, Sofifi akan menjadi transit area bagi mobilitas perdagangan dan jasa.

Kota Tidore merupakan kota yang dikenal sebagai kota pusaka. Kota Tidore berada bersebelahan dengan pulau Ternate dan Halmahera (Kota Sofifi). Kota Tidore menjadi salah satu wilayah yang menjadi tujuan utama bangsa Portugis saat menjajah Indonesia karena memiliki rempah – rempah yang berlimpah. Pemerintah dan masyarakat adat sepakat akan titik tolak Sejarah Tidore sejak Tidore resmi menjadi Kerajaan Islam pada tanggal 12 April 1109.

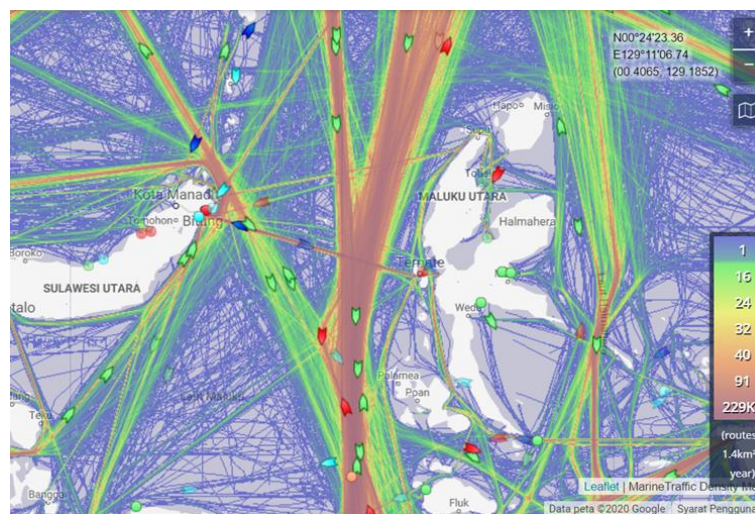
Dalam mencukupi kehidupan sehari – hari, penduduk Tidore banyak yang bercocok tanam seperti cengkeh, pala, kelapa, padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Rempah – remaph yang ditaman menjadikan Tidore terkenal dan dikunjungi oleh pedangan asing seperti Cina, India dan Aarab sampai akhirnya menjadi perebutan para bangsa Portugis.

Pola Perkembangan Kota

Wilayah Kota Sofifi dan Tidore berada di wilayah yang strategis di Provinsi Maluku Utara. Keberadaan kedua wilayah ini berhadapan langsung dengan Kota Ternate yang hanya berjarak sekitar 9 mil. Karakteristik wilayah ini merupakan satu kesatuan dari gugusan pulau besar dan pulau kecil yang dibatasi dengan laut yaitu Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Halmahera di sebelah timur, Laut Seram dan Laut Banda di sebelah selatan dan Laut Maluku di sebelah barat. Posisi Kota Sofifi dalam regional Kepulauan Maluku Utara berada pada jalur poros regional lintas Trans Maluku yang menghubungkan jalur Manado dengan Sorong sehingga posisi kota ini berpotensi menjadi kota transit.

Secara geografis, Maluku Utara terletak di perbatasan negara Indonesia dengan perairan internasional yaitu terhadap Laut Pasifik kemudian pada sisi barat wilayah Maluku Utara dilalui oleh jalur ALKI III (Alur Laut Kepulauan Indonesia III) yang merupakan jalur lintasan utama pelayaran internasional dari pasifik melewati Indonesia.

Dengan dilaluinya jalur ALKI III, Maluku Utara menjadi wilayah yang sangat penting karena menghubungkan beberapa wilayah Indonesia di bagian barat dengan Indonesia di bagian timur seperti Pulau Sulawesi dengan Maluku, Papua dan Papua Barat serta Indonesia dengan wilayah negara tetangga seperti Filipina, Korea Selatan, Bangkok dan China.



Gambar 1. Peta kerapatan lalu lintas kapal di sekitar perairan Maluku Utara
Sumber: <https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:125.4/centery:0.9/zoom:7>

Provinsi Maluku Utara terdiri dari ratusan pulau – pulau besar dan kecil mengakibatkan sistem transportasi wilayah memegang peranan yang sangat penting terutama transportasi laut dan udara.

Dalam perspektif pengembangan wilayah, kebijakan pengembangan kawasan perkotaan perlu dilakukan secara terpadu dalam sistem wilayah (regional). Pengembangan dilakukan dengan merumuskan konsep kota masa depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan.

Secara garis besar, konsep pengembangan yang akan dilakukan untuk mencapai pemerataan pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara adalah dengan meningkatkan potensi yang ada di setiap wilayah. Integrasi antara pengembangan kawasan juga perlu dilakukan dengan infrastruktur pendukung ke wilayah lain di sekitarnya sangat dibutuhkan sebagai *trigger* pengembangan aktivitas perekonomian. Posisi Sofifi, Kota Ternate dan Kota Tidore yang berdekatan perlu dioptimalkan fungsinya.

Terdapat 4 aspek fokus yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pembangunan wilayah yang berbasis kemaritiman, yaitu (1) Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya Maritim; (2) Kedaulatan maritim yang mencakup hukum dan perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim serta navigasi dan keselamatan maritim; (3) Sumber Daya Alam dan Jasa meliputi sumber daya hayati, mineral, energi, industri jasa maritim, lingkungan dan kebencanaan; dan (4) Infrastruktur yang meliputi tataruang, konektivitas dan sistem logistik, pertambangan dan energi, pelayaran, perikanan, pariwisata dan industri penunjang infrastruktur (Alamsyah, 2020). Berikut adalah konsep pengembangan yang akan dilakukan untuk masing –masing wilayah:

Kota Sofifi sebagai Pusat Perdagangan dan Pemerintahan Provinsi

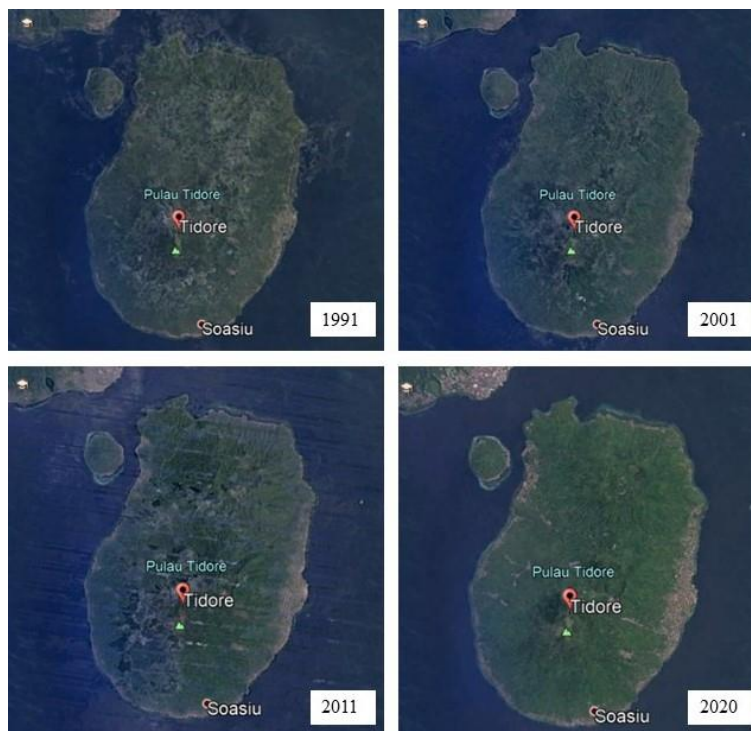
Sejak ditetapkan sebagai ibukota Provinsi, Kota Sofifi hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan namun belum mengalami perkembangan secara signifikan terhadap jenis kegiatan perekonomian dan wisata. Kegiatan perekonomian Provinsi Maluku Utara masih berpusat di Kota Ternate yang merupakan gerbang masuk utama provinsi ini. Ketidakmerataan perkembangan kota ini dikhawatirkan dapat menjadikan kota Sofifi yang merupakan ibukota Provinsi Maluku Utara ini sebagai kota yang tidak berkembang. Untuk itu diperlukan pengembangan sofifi sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan provinsi. Adapun inovasi yang dapat dilakukan untuk pengembangan infrastruktur bagi Kota Sofifi adalah:

1. Melakukan penataan kawasan perkotaan dengan konsep *waterfront city*. Dalam konsep ini tepian kota Sofifi akan difungsikan sebagai kawasan *mixed used* diantaranya kantor pusat pemerintahan, perumahan, pasar, rumah sakit, restoran dan pusat hiburan. Kota tepi laut atau pantai menjadi orientasi kawasan perkotaan serta menjadikan pantai sebagai ruang terbuka publik yang dapat diakses oleh umum yang didominasi dengan ruang terbuka hijau. Penerapan konsep ini dapat menghidupkan Kota Sofifi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan serta dapat mencegah permasalahan yang timbul akibat dari tidak tertatanya sebuah kota pesisir. Dalam merencanakan kota pesisir hal lain yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah dibangunnya *breakwater* atau pemecah ombak. Dengan adanya pemanasan global yang terus meningkat, maka perlu adanya prediksi terhadap kenaikan muka air laut yang akan terjadi.
2. Mengembangkan kawasan hunian yang berorientasi ke arah laut dengan ketinggian dan tipe bangunan disesuaikan dengan karakteristik kota tepi laut. Hunian dapat dibangun dengan konsep rumah panggung. Konsep hunian ini dapat menjadi solusi terhadap resiko bangunan tepi laut yang rentan terhadap kebencanaan wilayah seperti gempa dan kenaikan muka laut.
3. Menyediakan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana transportasi di kawasan perkantoran dan kawasan perumahan;

4. Mengembangkan konektivitas pelayanan dari dan menuju pusat Kota Sofifi berupa pengembangan jaringan jalan;
5. Membangun serta mengembangkan prasarana transportasi pelabuhan laut, bandara serta jembatan penghubung antar pulau;
6. Mengembangkan industri serta potensi perkebunan seperti pala dan cengkeh, perikanan, tambang serta kehutanan; dan
7. Perlu adanya penguatan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dengan membangun Pusat IPTEK guna mendukung serta menguatkan Kota Sofifi sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Pulau Tidore sebagai Pusat Pariwisata

Secara fisik bila dilihat juga dari *google earth* bahwa perkembangan kota di Pulau Tidore mengikuti pola jaringan jalan yang ada yaitu secara linier di sepanjang kawasan pesisir. Perkembangan kotanya terkonsentris pada wilayah pesisir timur sedangkan perkebunan pala dan cengkeh yang menjadi komoditas unggulan kota ini berada pada bagian barat Kecamatan Tidore.



Gambar 2. Perubahan Tutupan Lahan Pulau Tidore
Sumber: *Google Earth*. Diakses tanggal 3 Juli 2021

Bila dilihat juga dari sejarah yaitu sebagai tempat munculnya kerajaan Tidore dan ditetapkannya Tidore sebagai kawasan konservasi yang merupakan tempat tinggal Sultan Tidore serta potensi alam yang ada, Tidore merupakan kota yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat tinggi yang harus dipertahankan karakter kotanya dan dikembangkan dengan memajukan sektor pariwisata. Adapun pusaka peninggalan sejarah yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan pariwisata di Tidore antara lain adalah: (1) Monumen Sebastian De Elcano; (2) Kampung Gurabunga; (3) Pantai Akesahu; (4) Benteng Tahula; (5) Benteng Tore; (6) Kedaton Kesultanan Tidore; (7) Demaga Kesultanan; (8) Pulau Filonga; (9) Pantai Rum Tua; (10) Pulau Maitara; (11) Pulau Mare; dan (12) Air terjun luku cileng. Potensi ini dapat menjadikan Tidore sebagai Kawasan Strategis Pariwisata dan Sosial Budaya.

Inovasi pengembangan kawasan pariwisata dan sosial budaya Tidore dapat dilakukan dengan:

1. Membangun serta merevitalisasi kawasan bersejarah di Pulau Tidore. Pembangunan kawasan wisata direncanakan untuk saling terkoneksi. Hal ini penting dilakukan sebagai penggerak pertumbuhan dan perkembangan kota di Pulau Tidore. Pengembangan kawasan wisata di Pulau Tidore juga perlu menggunakan konsep wisata yang berbasis bencana mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan yang berpotensi rentan terhadap bencana alam;
2. Penanganan kawasan konservasi yang dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan sebagai lokasi agrowisata;
3. Mengembangkan sistem prasarana transportasi dan jaringan jalan guna menunjang wisata di Pulau Tidore;
4. Membangun serta mengembangkan prasarana transportasi pelabuhan laut, bandara serta jembatan penghubung antar pulau;
5. Pengendalian pembangunan rumah yang bertemakan budaya pesisir dengan cara mengatur syarat arsitektur rumah sehingga tidak terjadi perubahan bentuk menjadi bangunan yang modern. Rumah yang bertemakan budaya pesisir dapat mendukung wisata bahari di wilayah tersebut; dan
6. Melakukan penataan kawasan perkotaan dengan menjadikan kota tepi laut atau pantai sebagai orientasi kawasan perkotaan, menjadikan pantai sebagai ruang terbuka publik yang dapat diakses oleh umum yang didominasi dengan ruang terbuka hijau.

Pulau Ternate sebagai Pusat Perdagangan

Pulau/ Kota Ternate merupakan pintu gerbang masuknya Maluku Utara. Ternate merupakan wilayah yang dinilai sudah berkembang di Provinsi Maluku Utara dalam sektor perekonomian di bidang industri, perikanan, perdagangan dan jasa. Sarana dan prasarana transportasi sangat penting bagi pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara terutama dalam hubungannya antar wilayah serta sebagai sarana perpindahan orang maupun barang. Untuk itu diperlukan inovasi pengembangan terhadap sarana transportasi yang ada, diantaranya adalah dengan:

1. Melakukan penambahan rute yang dapat mengkoneksikan Provinsi Maluku Utara dengan provinsi serta negara lain. Mengingat letak Maluku Utara yang memiliki perbatasan negara dengan Negara Philipina dan lain – lain. Sehingga perlu pengembangan yang bersifat jangka panjang dengan melihat potensi perekonomian yang ada; dan
2. Mengembangkan prasarana transportasi pelabuhan laut serta membangun jembatan penghubung antar pulau dan terowongan bawah laut sebagai penghubung dari Ternate ke Tidore kemudian diteruskan melalui perbaikan jaringan jalan untuk selanjutnya kembali menghubungkan pulau Tidore ke Kota Sofifi melalui pembangunan jembatan penghubung.

Dalam pelaksanaan pengembangan pelabuhan serta merencanakan pembangunan infrastruktur berupa jembatan dan terowongan bawah laut yang diintegrasikan dengan jalan harus memperhatikan bagaimana perkembangan jalur laut dan kemungkinan adanya pelayanan pelabuhan internasional di Maluku Utara termasuk bagaimana jenis dan ukuran (lebar, ketinggian dan kedalaman) kapal yang akan melintas pada saat ini dan perkembangannya sampai 50 tahun bahkan 100 tahun kedepan serta merencanakan bentuk pelayanan, pengamanan, keselamatan serta pencegahan gangguan keamanan di alur terkait kapal lokal dan internasional yang lewat atau singgah. Jembatan harus didesain untuk tahan terhadap adanya bencana gempa bumi, ombak dan tekanan air laut sehingga setiap orang yang melewati jembatan ini akan merasa aman terhadap resiko terhadap faktor alam tersebut. Jembatan juga

perlu didesain dengan kamera pengawas yang dipasang di beberapa interval sepanjang jembatan serta teknologi tinggi yang dapat mendeteksi kestrabilan laju setiap kendaraan untuk menghindari terjadinya resiko kecelakaan lalu lintas.

Dengan dibangunnya jembatan dan terowongan bawah laut yang menghubungkan antara Kota Ternate – Pulau Tidore dan Kota Sofifi maka dapat memberikan efisiensi waktu tempuh yang digunakan untuk mencapai ke wilayah tersebut menjadi lebih cepat. Selain itu pengguna kendaraan (mobil pribadi maupun transportasi umum yang akan dikembangkan) juga dapat merasakan kenyamanan yang lebih dibandingkan harus menggunakan kapal feri.

Untuk menguatkan pemerataan pembangunan, selain pelaksanaan pengembangan fisik kota diatas juga perlu memperhatikan 4 aspek fokus pembangunan wilayah berbasis kemaritiman yang disampaikan dalam pembahasan sebelumnya yaitu:

- 1) Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya Maritim. Perlu adanya pembangunan dan pengembangan Pusat Penelitian pada wilayah yang berbasis kemaritiman oleh Pemerintah dalam hal ini dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pusat penelitian ini juga sekaligus sebagai pusat data dan informasi biota serta ekosistem yang ada di darat maupun perairan.
- 2) Kedaulatan maritim yang mencakup hukum dan perjanjian, keamanan dan ketahanan, delimitasi zona serta navigasi dan keselamatan maritim. Dasar hukum dan perjanjian menjadi hal penting yang harus diperhatikan karena hal tersebut sangat berhubungan dengan batas kedaulatan negara di wilayah perairan laut dengan negara tetangga sekitar seperti Filipina, Korea Selatan, Bangkok dan China.
- 3) Sumber Daya Alam dan Jasa meliputi sumber daya hayati, mineral, energi, industri jasa maritim, lingkungan dan kebencanaan. Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang kaya akan hasil alamnya baik di sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan. Namun berdasarkan data BPS bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki kontribusi sektor industri dan energi yang masih kecil. Dengan melihat kondisi tersebut, maka perlu adanya pengembangan dan peningkatan pelestarian terhadap Sumber Daya Alam dan Jasa meliputi sumber daya hayati, mineral, energi, industri. Untuk pengembangan sektor energi dapat dilakukan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan gelombang laut sebagai turbin atau pembangkit energi arus laut. Selain itu, peningkatan keterampilan sumber daya manusia penduduk setempat juga perlu dilakukan guna menunjang pengembangan dan budidaya hasil alam dengan baik.
- 4) Aspek Infrastruktur yang meliputi tataruang, konektivitas dan sistem logistik, pertambangan dan energi, pelayaran, perikanan, pariwisata dan industri penunjang infrastruktur. Pembangunan kawasan pesisir perlu dilakukan perencanaan yang baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, konektivitas setiap wilayah guna memberi kelancaran terhadap sistem logistik dan pergerakan manusia serta industri penunjang infrastrukturnya. Dalam pengembangan konsep tata ruang dan pengembangan pariwisata suatu wilayah, hal terpenting yang perlu diperhatikan pemerintah adalah aspek kebencanaannya mengingat negara Indonesia khususnya Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang berpotensi terhadap ancaman bencana alam.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan ini adalah dalam melakukan pemerataan pengembangan wilayah Provinsi Maluku Utara dilakukan dengan meningkatkan potensi yang ada di setiap wilayah dengan merumuskan konsep kota masa depan yang ramah terhadap publik dan lingkungan. Kota Ternate dikembangkan sebagai pusat perdagangan, Kota Sofifi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan dan Pulau Tidore sebagai pusat pariwisata. Integrasi antar

wilayah dilakukan dengan inovasi infrastruktur dan strategi pengembangan jaringan transportasi sebagai trigger pengembangan aktivitas perekonomian serta membuka terisolasinya wilayah yang belum berkembang.

Saran terhadap penelitian berikutnya untuk dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap isu, potensi dan masalah yang ada dengan fokus kepada masing – masing wilayah, sehingga saran terhadap pengembangan Kepulauan Maluku Utara dapat lebih merepresentasikan hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan Kepulauan Maluku Utara sebagai wilayah maritim. Agar tidak terjadi ketimpangan pada tahun yang akan datang, maka pengembangan tidak hanya dilakukan di wilayah daratan saja melainkan juga di wilayah perairannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A.T. (2020). Paradigma Baru Tanah Air Negara Archipelago. Bahan Ajar: Kajian Pengembangan Perkotaan. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2020). Provinsi Maluku Utara Dalam Angka: Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan.
- Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2020). Kota Ternate Dalam Angka: Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan.
- Ehler, C. (2017). A Guide to Evaluating Marine Spatial Plans.
- Febrianty, S. D. (2015). Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Wilayah Kota Tidore. *SPATIAL*, 1(1), 62-69.
- Gubernur Maluku Utara. (2018). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038.
- Muhammad, R., & Moniaga, I. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Optimalnya Fungsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Oba Utara. *Spasial*, 7(1), 23-29.
- Mustofa, A. F., Franklin, P.J., & Wuisang, C.E. (2019). Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bagian Infrastruktur Untuk Mendukung Kota Tidore Kepulauan Sebagai Kota Jasa Berbasis Agromarine. *Spasial*, 6(3), 839-850.
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Rustiadi, E. (2001). Pengembangan Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah. Jakarta: Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICZM). DKP.
- <https://www.marinetraffic.com>. Marine Traffic. [Internet]. [diunduh 2020 April 14]. Tersedia pada: <https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:125.4/centery:0.9/zoom:7>